

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini mengangkat tema mengenai pemberitaan kabut asap yang mulai muncul di pemberitaan media nasional pada awal September dan mulai redup akhir Oktober 2015. Kabut asap sendiri merupakan sebuah peristiwa kebakaran hutan di enam provinsi yaitu Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan. Peristiwa ini menarik diteliti, terlebih jika merujuk pada *framing* media, adanya penonjolan isu dari hasil penekanan fakta ataupun pengecualian fakta yang diambil dari sebuah peristiwa yang kemudian dikemas dalam sebuah berita.

¹Peristiwa kabut asap ini bukan yang pertama kali, melainkan pada tahun-tahun sebelumnya juga terjadi. Tepatnya 18 tahun peristiwa kabut asap ini kembali terulang, terhitung dari tahun 1997 hingga 2015. Kebakaran sering terjadi pada musim-musim kemarau, dimana kebakaran mudah terjadi, ditambah faktor arah angin yang mempercepat penyebaran kebakaran. Titik api yang kemudian meluas semakin tidak terkendalikan oleh para petugas pemadam, terlebih jika terjadi kebakaran di lahan gambut yang lebih susah untuk dipadamkan.

¹ USMAN ERMULAN : 18 Tahun Bencana Kabut Asap Telah Terjadi (2015, 10 September). Aksi Post [online]. Diakses pada tanggal 3 November 2016 dari <https://www.aksipost.com/2016/08/17/usman-ermulan-18-tahun-bencana-kabut-asap-telah-terjadi/>

²Selain faktor alam, faktor manusia pun juga menjadi sorotan atas peristiwa kabut asap ini. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), meyakini peristiwa kabut asap ini melibatkan sejumlah perusahaan perkebunan dan hutan tanaman industri (HTI). Umumnya pembakar lahan adalah petani untuk persiapan menanam agar lahan gambut menjadi subur, namun yang paling berdampak menjadi kabut asap adalah ketika sebuah korporasi yang membakar. Temuan titik api pun berasal dari lahan perusahaan HTI yang kemudian menyebar ke lahan lainnya.

³Dalam UU Nomer 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, telah diatur wewenang antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menghadapi suatu bencana. Dimana pemerintah daerah memiliki wewenang untuk melakukan pencegahan ataupun mengatasi bencana, dalam kasus ini ialah bencana kabut asap. Pemindahan wewenang penanggulangan bencana dari pemerintah daerah ke pusat dapat dilakukan, apabila bencana tersebut memakan banyak korban, mencakup daerah yang luas serta perlu mendapatkan instruksi dari Presiden bahwa bencana itu merupakan bencana nasional.

Penanggulangan pemerintah daerah tersebut juga bisa diartikan untuk memproses sanksi hukum bagi para pelaku pembakaran hutan. Hukumannya pun diatur dalam Undang-undang No 4 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 50 huruf D. Setiap orang dilarang membakar hutan. Pasal 78 ayat 3 bisa dipenjara 15 tahun dan denda maksimal 5 miliar. Serta, Pasal 78

² Siapa yang harus bertanggungjawab atas kabut asap di Sumatera (2013, 28 Juni). BBC Indonesia [on-line]. Diakses pada tanggal 6 November 2016 dari http://www.bbc.com/indonesia/forum/2013/06/130628_forum_kabutasap/

³ Diambil dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Republik Indonesia. Diakses pada tanggal 5 November 2016 dari <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/Ind/>

ayat 4, dengan ancaman pidana 5 tahun penjara, dan denda paling banyak, 1,5 miliar.

Selain itu tersangka bisa pula dijerat dengan undang-undang No 18 tahun 2004, tentang perkebunan, pasal 8 ayat 1. Bila dengan sengaja membuka dan atau mengola lahan dengan cara pembakaran yang berakibat pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup diancam dengan pidana penjara, paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Adapun tambahan dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 108, intinya melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar diancam pidana penjara minimal 3 tahun, maksimal 10 tahun. Dan denda minimal 3 miliar, maksimal 10 miliar.

Disisi lain, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendesak pemerintah untuk merevisi UU nomer 32 pasal 69 tentang Lingkungan Hidup. Dilansir dari berita CNNIndonesia.com pada tanggal 28 September 2016, Direktur Eksekutif Gapki Fadhil Hasan menjelaskan UU tersebut mengizinkan petani membakar lahan untuk kepentingan bercocok tanam maksimal dua hektare. Dari hal tersebut, Fadhil menilai pasal tersebut menjadi penyebab sulitnya pemerintah dan penegak hukum melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan pembakaran hutan, sehingga untuk mendapatkan ijin pembakaran hutan pun menjadi mudah.

⁴Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Kesehatan pada akhir Oktober 2015, sebanyak 425.377 orang terserang infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat dampak kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan dan Sumatera. Selain masalah kesehatan, kebakaran hebat ini juga menyebabkan kerugian besar untuk negara ini.

Kerugian yang dicapai diperkirakan mencapai Rp.200 triliun, melebihi kerugian pada tahun 1997, padahal jumlah lahan yang terbakar jauh lebih sedikit. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan total lahan yang terbakar di Sumatera dan Kalimantan mencapai 1,7 juta hektar dengan titik api sekitar 1.800, jauh lebih kecil dibandingkan pada tahun 1997 yaitu 9,7 juta hektar. Peneliti Center for International Forestry Research (CIFOR), Herry Purnomo, menjelaskan hitungannya itu didasarkan pada angka kerugian pada tahun 1997 ditambah dengan kerugian yang dialami Malaysia dan Singapura. Perhitungan tersebut masih sangat kasar jika dilihat dari kerugian ekonomi, tanaman yang terbakar, air yang tercemar, emisi, korban jiwa dan juga penerbangan.

⁵Selain menyebabkan kerugian untuk negeri ini, ternyata kabut asap juga merambah ke negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Seperti yang diberitakan Merdeka.com tanggal 25 Oktober 2015, sejumlah rumah sakit di Negara Bagian Johor dan Malaka, Malaysia, mencatat peningkatan serangan penyakit asma lebih dari seratus persen akibat kabut asap dari

⁴ Dampak Kabut Asap, ISPA Jangkiti 425 Ribu Jiwa Di 7 Provinsi. (2015, 17 Oktober). Tempo [on-line]. Diakses pada tanggal 6 Maret 2016 dari <https://m.tempo.co/read/news/2015/10/17/206710325/dampak-kabut-asap-ispajangkiti-425-ribujiwa-di-7-provinsi>

⁵ Idris Rusadi Putra. (2015, 24 Oktober) Meradangnya Malaysia & Singapura soal asap, hingga gugat Indonesia. Merdeka [on-line]. Diakses pada tanggal 6 Maret 2016 dari <http://www.merdeka.com/uang/meradangnya-malaysia-singapura-soal-asap-hingga-gugat-indonesia.html>

Indonesia yang menyelimuti wilayah itu. Sekretaris Jenderal Kesehatan Noor Hisham Abdullah mengatakan penyakit lain seputar dampak kabut asap juga meningkat tajam "Di Johor terjadi peningkatan 38,5 persen kasus penyakit pernapasan dan asma 122 persen. Di Malaka kasus asma meningkat 127 persen,". Di Singapura sendiri, telah meliburkan semua sekolah SD hingga SMP untuk pertama kalinya demi mengurangi dampak kabut asap pada warganya.

Tentunya, peristiwa kabut asap ini memancing media untuk meliputnya. Dari seberapa besar dampak yang ditimbulkan, cara penanganannya serta penegakan hukum terkait pembakar hutan. Pada media cetak sendiri, tepatnya pada 5 September 2015, merupakan awal pemberitaan terkait peristiwa kabut asap dan beberapa media cetak nasional bahkan menjadikannya sebuah *headline*. Media Cetak Nasional itu adalah Harian Kompas, Jawa Pos, Republika dan Koran Sindo. Pemberitaan awal mengenai kabut asap ini juga dapat membantu penulis menemukan sudut pandang yang ingin dibentuk keempat media ini kepada pembaca. Hanya Koran Sindo yang tidak menempatkannya pada *headline*, sehingga menarik untuk dilihat, isu apa yang ingin ditonjolkan oleh Koran Sindo dengan tidak menempatkannya sebagai *headline*.

Namun dalam satu peristiwa tersebut, setiap media cetak dapat memiliki gayanya masing-masing untuk mengemas suatu peristiwa. Gaya atau *style* pengemasan berita itu dapat tercermin dari *angle* penulisan dan judul yang dibuat.

Judul sendiri merupakan essensi penting dari sebuah berita utama, merujuk pada Syarifudin (2012 : 75) , tidak ada berita yang menarik tanpa judul, tidak ada berita yang menjadi *public issue* tanpa judul berita. Pada

dasarnya, judul memiliki kegunaan untuk menarik perhatian dan minat pembaca, apalagi bila di gunakan sebagai berita utama biasanya menggunakan tipografi yang sangat besar agar lebih efektif. Sehingga perbedaan judul berita akan membuat pemahaman pembaca akan berbeda – beda antara satu media dengan media yang lain.

Pada Kompas edisi 5 September 2015 dengan judul “*Kabut Asap Darurat*”. Kompas dalam hal ini memiliki pandangan bahwa, kabut asap telah berada pada situasi darurat dan memerlukan penanganan sigap.

"Presiden meminta kepala daerah agar tidak ragu-ragu menyatakan darurat asap. Bencana ini bukan bencana kebakaran hutan, tetapi bencana darurat asap," kata Kepala BNPB Syamsul Maarif di Kantor Presiden.

Pandangan tersebut diperkuat melalui kutipan narasumber seperti di atas. Kutipan tersebut secara langsung ingin memberikan penguatan terhadap judul diatas, dimana adanya tindakan sigap untuk menyikapi peristiwa kabut asap

Jawa Pos, pada tanggal yang sama memberi judul *headline* “*80 Persen Sumatera tertutup Asap*” (7 September 2015). Jawa Pos, lebih menunjukkan pada dampak yang telah besar pada peristiwa kabut asap yang harus segera diatasi.

“Sebanyak 25,6 juta orang terpapar asap. Tiga juta warga kalimantan dan sisanya di Sumatera,” ungkapnya (Sutopo Kepala Pusat Informasi dan Data BNPB)

Kutipan di atas memperkuat judul *headline* Jawa Pos. Hal ini mengutkan judul *headline*, bahwa bencana kabut asap sudah telah menimbulkan dampak yang luas.

Republika memberikan porsi yang sama pula, dengan menempatkan kabut asap menjadi *headline* dengan judul “*Operasi Darurat Kabut Asap Digelar*” (7 September 2015). Kurang lebih sama dengan Kompas, penulisan Republika lebih kepada kesiapan untuk menangani peristiwa kabut asap dengan adanya operasi darurat.

“Pemerintah daerah bersama TNI, Polri, dan masyarakat agar mengerahkan segala kemampuan untuk memadamkan api secepatnya dan menjaga keselamatan serta kesehatan warga” kata Presiden sesuai rapat terbatas di Istana Negara.

Kutipan tersebut sekaligus memperkuat judulnya, dimana operasi darurat kabut asap dilakukan dengan sigap atas instruksi Presiden Jokowi.

Berbeda dengan yang lain, Koran Sindo memberitakan kabut asap pada tanggal yang sama, tetapi tidak menjadikannya berita di halaman utama dengan judul “*Sumatera Darurat Kabut Asap*” (5 September 2015). Dalam pemilihan judul yang dibuat oleh Koran Sindo, lebih sebagai sebuah bentuk peringatan darurat kabut asap di Sumatera yang memerlukan penanganan cepat.

“Dari data pagi ini (kemarin), hampir seluruh Sumatera tertutup asap mulai dari Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara hingga Aceh” kata Kepala BMKG Stasiun Pekanbaru Sugarin.

Kutipan itu memperkuat judul yang mengindikasikan, Sumatera darurat kabut asap, sehingga perlu adanya penanganan yang cepat dan efektif..

Berita di atas membuktikan bahwa aspek individu dari wartawan sangat mempengaruhi berita. Wartawan secara subyektif memberikan

pemaknaan atas peristiwa atau fakta tertentu yang juga memakai perspektif tertentu untuk ditampilkan pada khalayak. Wartawan secara sengaja mengambil narasumber atau data-data yang sudah dia persiapkan akan dicari sebelumnya, dari suatu peristiwa untuk dituliskan pada sebuah berita. Bisa diartikan, dalam suatu berita terdapat opini yang ingin disampaikan wartawan sekaligus media kepada pembaca. Itulah alasan mengapa adanya perbedaan judul dan *angle* dalam satu peristiwa atau fakta.

Dalam uraian tersebut, bisa dikatakan bahwa media maupun wartawan bukanlah agen yang netral melainkan agen konstruksi, bagaimana fakta-fakta tersebut ditampilkan secara simbolik, maka realitas fakta tergantung bagaimana realitas itu dilihat dan fakta tersebut dikonstruksi oleh sebuah media itu sendiri (Eriyanto, 2002 : 21).

Merujuk pada Eduardus Dosi (2012 : 7-8), media tidak serta-merta memberikan informasi tanpa adanya muatan tertentu, terlebih mengenai politik, kehadirannya tidak selalu diperlakukan dengan pola-pola relasi yang sederhana. Dalam kasus ini, media merekonstruksi realitas dan menanamkan ideologi tertentu untuk menjatuhkan ataupun mendukung pemilik kekuasaan saat itu, yang kemudian diterima masyarakat sebagai sebuah informasi yang objektif dan faktual.

Uraian tersebut merupakan hasil dari konsep pembedahan atau *framing* yang dilakukan oleh media terhadap sebuah realitas yang ada. Pada pengertian *framing* oleh Eriyanto (2002 : 68-69), *framing* adalah sebuah strategi bagaimana realitas / dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan pada khalayak pembaca melalui penyeleksian fakta yang akan ditonjolkan dan dihilangkan.

Framing sendiri berasal dari kata *frame*, yang memiliki arti, bentuk yang muncul dari pikiran (kognisi), penafsiran dan penyajian dari seleksi, penekanan dan pengecualian dengan menggunakan simbol-simbol yang dilakukan secara teratur dalam wacana yang terorganisir, baik dalam bentuk verbal maupun visual. Jadi pada dasarnya, *frame* media dengan *frame* dalam pengertian sehari-hari yang kita lakukan tidaklah berbeda jauh.

Masalah dari *framing* yang dilakukan oleh media adalah efek dari *framing* itu sendiri. Dengan adanya 1 peristiwa yang sama tetapi muncul empat berita yang berbeda, terjadi pemahaman yang berbeda antara pembaca media Jawa Pos dengan pembaca media lain mengenai berita kabut asap. Dengan adanya perbedaan pemahaman mengenai sebuah peristiwa, tentunya menghasilkan sebuah realitas yang berbeda antara satu sama lain atas peristiwa yang sama.

Merujuk pada efek *framing*, Pemilihan keempat media itu didasari oleh banyaknya pembaca dari koran tersebut. Merujuk pada buku Analisis Framing oleh Eriyanto, (2002:27), berita adalah produk dari konstruksi dan pemaknaan atas realitas yang dibuat oleh wartawan ataupun media. Sehingga, semakin banyaknya pembaca, semakin banyak pula khalayak media yang terkena pemahaman konstruksi realitas yang dikemas oleh keempat media itu. Banyaknya pembaca juga bisa dilihat dari jumlah produksi oplah per hari oleh media cetak tersebut. Karena semakin banyak oplah yang diproduksi maka semakin banyak pula orang yang berlangganan atau membaca koran tersebut. Menurut data Serikat Penerbit Surat Kabar tahun 2011 terdapat urutan 10 Koran terbesar berdasarkan jumlah oplahnya per hari.

Tabel 1.1 : Jumlah Oplah Media Cetak per hari

NO	Media	Oplah per hari
1	Kompas	600.000
2	Jawa Pos	450.000
3	Suara Pembaharuan	350.000
4	Republika	325.000
5	Media Indonesia	250.000
6	Koran Tempo	240.000
7	Rakyat Merdeka	210.000
8	Pos Kota	200.000
9	Pikiran Rakyat	185.000
10	Suara Merdeka	176.000

(Sumber : *www.spsindonesia.org*)

Kompas dan Jawa Pos merupakan sebuah media cetak dengan jumlah pembaca terbanyak. Dari hasil penelitian lembaga riset asal Australia Roy Morgan, Jawa Pos memiliki rata-rata pembaca 1,4 juta orang sedangkan Kompas 1,2 juta orang. Selain itu, menurut Hamad (2004 : 119 -120 & 151 – 152), kedua media ini sejatinya memiliki ideologi yang sama, yaitu ideologi yang lebih pada oplah / bisnis. Jadi penulisan moralitasnya diorientasikan pada pasar pembacanya. Sehingga kedua media ini menarik untuk diteliti mengenai keberpihakan politiknya melalui peristiwa kabut asap.

Koran Republika masuk dalam 10 media cetak terbesar di Indonesia, dengan oplah per hari sekitar 325.000 menurut data yang didapat dari Serikat Penerbit Surat Kabar 2011. Mengenai ideologi, merujuk pada Hamad (2004 : 122), koran ini memiliki ideologi keislaman yang sangat kuat sebagai ideologi dasar dalam berita yang dimuat. Jadi media ini menarik untuk diteliti mengenai muatan politik dalam sebuah bencana besar seperti kabut asap.

Terakhir, Koran Sindo adalah koran yang dimiliki oleh Hary Tanoesoedibjo yang merupakan penggiat politik aktif. Koran ini tidak masuk dalam 10 besar koran terbesar nasional namun dipilih karena adanya keterbatasan peneliti untuk mendapatkan media cetak nasional lain. Media ini cukup menarik di teliti karena apakah dalam berita mengenai peristiwa kabut asap akan menjadi sangat menonjolkan sosok pemilik dalam berita atau tidak, dan juga mencari sudut pandang media ini dalam pemberitaan kabut asap.

Sejalan dengan hal tersebut, maka peneliti akan menggunakan model analisis dari Zhondhang Pan dan Gerald M. Kosicki. Menurut Pan dan Kosicki frame diartikan sebagai suatu ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita (seperti kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu) ke dalam teks secara keseluruhan serta berhubungan dengan makna (Eriyanto, 2002:252). *Sintaksis* (cara wartawan menyusun fakta), *Skrip* (cara wartawan mengisahkan fakta), *Tematik* (cara wartawan menulis fakta), dan *Retoris* (cara wartawan menekankan fakta) adalah perangkat-perangkat yang digunakan dalam model framing Pan dan Kosicki (Sobur, 2012 : 175).

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian, yaitu “Bagaimana bingkai berita kabut asap dalam Harian Kompas, Jawa Pos, Republika dan Koran Sindo?”

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembingkai berita yang dilakukan Kompas, Jawa Pos, Koran Sindo dan Republika dalam peristiwa kabut asap.

I.4 Manfaat Penelitian

I.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk menambah kajian ilmu komunikasi yang berkaitan dengan analisis framing sehingga hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi landasan pemikiran atau referensi untuk penelitian-penelitian sejenis selanjutnya.

I.4.2. Manfaat Praktis

Memberikan data secara kualitatif tentang perspektif yang digunakan oleh berita Kompas, Jawa Pos, Republika, dan Koran Sindo dalam memberitakan peristiwa kabut asap. Selain itu diharapkan publik bertindak netral dalam menanggapi pemberitaan kabut asap. Publik diharapkan tidak hanya fokus pada satu berita,

Melainkan juga melihat bagaimana pemberitaan yang dilakukan oleh surat kabar harian yang lain.